

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu pendidikan kejuruan formal yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, (Dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, 1990). Pendidikan SMK berperan membentuk peserta didiknya menjadi SDM yang profesional, produktif, kreatif, mandiri, unggul dan berakhlak mulia dalam menyukseskan pembangunan nasional. Standar keberhasilan pendidikan SMK diukur dari kesesuaian jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang ditekuninya, (Firdauz, dkk., 2019).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, terdapat 146 kompetensi keahlian yang dikembangkan di SMK. Keberagaman jenis kompetensi keahlian di SMK jelas menghasilkan kondisi sumber daya pendidikan yang bervariasi. Mengingat saat ini jumlah SMK berningkat namun tidak diimbangi dengan persyaratan minimum berdirinya satuan pendidikan menimbulkan rasa kurang percaya diri dari masyarakat dan pengguna lulusan. Hal ini didasari pada survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada beberapa tahun kebelakang bahwa lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Indonesia. Terhitung hingga saat ini, secara nasional Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK berada urutan teratas dengan 8,49%, (Badan Pusat Statistik, 2020). Kesenjangan antara harapan dan kenyataan dilapangan menimbulkan perspektif negatif dari *stakeholder* terhadap lulusan SMK. Lulusan SMK dinilai tidak kompeten dan kurang memiliki kesiapan untuk bekerja.



Gambar 1.1 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020

Sumber: Berita Resmi Statistik, (2020)

Sebenarnya, ada beberapa lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan presentasi dibandingkan dengan Februari 2019, salah satunya adalah Bidang Konstruksi (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini merupakan kesempatan bagi lulusan SMK bidang Teknologi dan Rekayasa, khususnya pada Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan untuk mengisi peluang tersebut. Berdasarkan fakta di atas, ternyata lulusan Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan banyak dibutuhkan, namun kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh dunia kerja. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya lulusan SMK (57%) yang bekerja di industri kurang mencapai standar kelulusan masuk kerja. (Mardani, dkk, 2019).

Ada beberapa penyebab penurunan kompetensi lulusan SMK diantaranya, motivasi dalam belajar kurang, *jobsheet* praktikum tidak selaras dengan kebutuhan industri dan kurangnya percaya diri (Mardani, dkk., 2019). Selain itu, kurangnya fasilitas penunjang yang digunakan peserta didik saat melakukan praktik menjadi penyebab terhambatnya penguasaan keterampilan yang semestinya dimiliki oleh siswa (Firdaus, dkk., 2019). Melihat kondisi tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki agar lulusan SMK dapat terserap di lapangan pekerja, salah satunya adalah merevitalisasi sarana prasarana yang dimiliki oleh SMK. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMK seharusnya

berorientasi pada kurikulum yang digunakan dan sesuai dengan perkembangan yang ada di lapangan kerja. Berdasarkan Dokumen Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, (2016), dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, ada beberapa hal yang perlu direvitalisasi, diantaranya adalah menyediakan tenaga pendidik, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas serta pengembangan SMK unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah masing-masing. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh institusi pendidikan harus berbasis pada penguasaan keterampilan yang spesifik guna menunjang mata pelajaran produktif.

Penyelenggaraan pendidikan di SMK berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), karena penyelenggaraan pendidikan di SMK diarahkan pada upaya untuk membekali para peserta didik dengan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Implikasi dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut adalah pada jumlah biaya (biaya pendidikan) yang harus dialokasikan. Menurut Yayat (2019) dijelaskan bahwa biaya pendidikan yang dibutuhkan pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti SMK meskipun daya tampung kelasnya lebih sedikit adalah sekitar 2-3 kali lipat lebih tinggi dibanding pendidikan umum atau pendidikan yang tanpa praktik. Biaya tersebut digunakan untuk membayar: (a) gaji guru/pendidik, (b) biaya peralatan, (c) biaya infrastruktur, dan (d) biaya operasional seperti pembelian bahan/alat praktek, pemeliharaan peralatan, dan pembelian suku cadang pendukung.

Biaya Pendidikan merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk uang, barang, tenaga dan pengorbanan peluang yang digunakan untuk menyelenggaraan kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar (Setyaningrum, 2014). Biaya pendidikan terdiri dari (1) biaya satuan pendidikan, yang meliputi biaya operasional, biaya investasi, bantuan pendidikan dan beasiswa, (2) biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan, (3) biaya peserta didik. Biaya satuan Pendidikan di klarifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi (1) biaya institusi yang terdiri dari biaya investasi (lahan dan non

lahan) dan biaya operasional (personal dan operasional) (2) biaya pribadi yang terdiri dari biaya langsung dibayarkan ke sekolah dan tidak langsung dibayarkan ke sekolah, (Yayat, 2019).

Biaya pendidikan dapat dibedakan berdasarkan kategori dan sifatnya. Menurut Supriadi (2010) dan Yayat (2019), biaya pendidikan dapat dikategorikan menjadi (1) biaya langsung, (2) biaya tak langsung, (3) biaya pribadi dan, (4) biaya sosial. Biaya langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti alat, bahan dan sarana pembelajaran. Biaya tak langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang kegiatan pembelajaran, seperti biaya pemeliharaan, biaya hidup siswa, biaya transportasi, biaya habis pakai non pembelajaran dan lain-lain. Biaya pribadi adalah segala bentuk pengeluaran dari peserta didik dan keluarga untuk kepentingan pendidikan. Biaya sosial adalah segala bentuk pengeluaran dari masyarakat untuk keperluan pendidikan. Biaya pendidikan berdasarkan sifatnya di antara lain; (1) biaya rutin, dan (2) biaya investasi (Supriadi, 2010; Yayat 2019). Biaya rutin adalah segala bentuk pengeluaran berbagai kegiatan yang sifatnya rutin, seperti pembayaran gaji pendidik dan kependidikan, pengadaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), pemeliharaan dan perawatan ringan serta pembayaran daya dan jasa. Biaya investasi adalah segala bentuk pengeluaran berupa investasi pembangunan tanah, peralatan dan sarana prasarana. Biasanya biaya rutin dituangkan dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan biaya investasi dituangkan dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP), (Yayat, 2019).

Yayat (2019) menjelaskan bahwa biaya satuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu; (1) biaya institusi dan; (2) biaya pribadi. Biaya institusi adalah biaya yang dikeluarkan oleh institusi/badan penyelenggara pendidikan untuk melangsungkan proses pembelajaran. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pribadi peserta didik untuk melangsungkan proses pembelajaran. Biaya institusi satuan pendidikan dapat berupa; (1) biaya investasi/biaya modal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh institusi/badan penyelenggara pendidikan dengan usia pakai penggunaannya lebih dari satu tahun; (2) biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan

oleh institusi/badan penyelenggaraan pendidikan dengan usia pakai penggunaannya kurang dari sama dengan satu tahun. Baik biaya investasi dan biaya operasional, bisa dibedakan berdasarkan penggunaannya yaitu personal (biaya yang diperuntukan untuk manusia/personal) dan non personal (biaya yang diperuntukan untuk selain manusia/nonpersonal). Biaya investasi personal berupa pelatihan, seminar, loka karya dan lain-lain. Biaya investasi nonpersonal berupa sarana prasarana, pengolahan lahan, gedung, dan peralatan pendidikan (diantaranya media pembelajaran, meja, kursi, papan tulis, perabot, alat praktik dan lain-lain). Biaya operasional personal berupa gaji dan tunjangan guru dan gaji dan tunjangan non guru. Biaya operasional nonpersonal berupa ATK (Alat Tulis Kantor), BAHF pembelajaran, BAHF non pembelajaran, jasa dan daya, transportasi dan lain-lain.

Proses pendidikan tidak bisa lepas dari ketersediaan sumber daya pendidikan. Maka dari itu, biaya pendidikan menjadi salah satu komponen penting penentu terselenggaranya suatu kegiatan pembelajaran. Menurut Yayat (2019), sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia selama ini masih mengandalkan sumber dari pemerintah, yang penggunaannya pun masih besar digunakan pada biaya operasional personal yang meliputi gaji dan tunjangan guru dan non guru. Sementara untuk biaya non personal yang menunjang proses pembelajaran masih kurang. Hal ini didasari oleh biaya operasional non personal yang sangat kecil yaitu hanya 2% untuk pembiayaan bahan praktik (Sugandi, M. 2011; Yayat, 2019). Sugandi, M. (2011), juga menambahkan bahwa alokasi biaya yang diperoleh dari pemerintah untuk biaya personal mencapai 80% dan sisanya untuk non personal. Fattah, N., (2009) menambahkan juga bahwa Alokasi Biaya Pendidikan untuk BAHF hanya sekitar 10,26%. Dari informasi diatas sangat jelas bahwa, alokasi biaya operasional non personal sangatlah kecil.

Penulis membatasi penelitian pada biaya langsung operasional non personal, yaitu biaya operasional non personal yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam mengkaji biaya langsung operasional non personal, perlu mengetahui aktivitas pembelajaran yang harus dijalani oleh siswa pada mata pelajaran keahlian guna menghasilkan rancangan biaya satuan yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Pada bidang keahlian pengelasan terdapat 5 mata pelajaran bidang keahlian C3, salah satunya adalah Teknik Pengelasan Busur Manual yang

didalamnya memiliki jumlah praktikum yang disesuaikan dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), (Direktur Jendral Pendidikan Dasar Menengah, 2018). Pada setiap praktikum, perlu juga mengetahui berapa jumlah latihan yang harus ditempuh siswa untuk mencapai SKKNI, karena bagaimana mungkin seorang siswa dapat dikatakan lulus SKKNI atau mata pelajaran tersebut jika hanya melakukan satu kali praktikum. Hal ini dibuktikan oleh Hargiyarto, dkk. (2015) yang meneliti berbagai kesalahan las peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bidang pengelasan SMK se-DIY yang menerangkan bahwa peserta didik SMK Bidang Pengelasan pada kegiatan LKS masih banyak yang belum memenuhi SKKNI, padahal peserta LKS adalah para siswa perwakilan terbaik di sekolahnya. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan dalam rangka melaksanakan praktik pengelasan yang mengacu kepada standar kompetensi dan teruji melalui kompetisi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, diantara delapan standar pendidikan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, kajian tentang standar pembiayaan masih jarang dilakukan, (Sumaryanto, dkk., 2014). Hal ini membuktikan bahwa perlu ada pengkajian biaya langsung operasional non personal guna membiayai seluruh kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis akan mengkaji biaya langsung operasional non personal yang dibutuhkan suatu SMK untuk membekali siswa sampai lulus kompetensi, khusus untuk mata pelajaran bidang keahlian Teknik Pengelasan Busur Manual dengan menggunakan perhitungan yang mengacu pada aktivitas pembelajaran menggunakan metode *Learning Activity Based Costing* (LABC). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa metode LABC menyediakan informasi lebih akurat dan komprehensif, karena didasarkan pada jumlah biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pembelajaran (Yayat, dkk., 2019). Kajian ini akan penulis rincikan dan tuangkan dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Biaya Satuan pada Mata Pelajaran Teknik Pengelasan Busur Manual di SMK”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dihadapi setelah diuraikan pada latar belakang adalah:

- (1) Berapa biaya satuan yang saat ini dianggarkan oleh pihak SMK untuk setiap siswa pada mata pelajaran Teknik Pengelasan Busur Manual?
- (2) Berapa biaya satuan yang seharusnya dianggarkan untuk setiap siswa pada pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Teknik Pengelasan Busur Manual agar memenuhi tuntutan kebutuhan standar kompetensi mata pelajaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang:

- (1) Besarnya biaya satuan yang saat ini dianggarkan oleh pihak SMK untuk setiap siswa pada mata pelajaran Teknik Pengelasan Busur Manual.
- (2) Besarnya biaya satuan yang seharusnya dianggarkan untuk setiap siswa pada pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Teknik Pengelasan Busur Manual agar memenuhi tuntutan kebutuhan standar kompetensi mata pelajaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

- (1) Secara Teoritis, yaitu memberikan inovasi analisis biaya satuan yang dapat dikembangkan untuk memperoleh proses pembelajaran satuan pendidikan kejuruan yang sesuai tuntutan kebutuhan standar kompetensi mata pelajaran dari segi standar pembiayaan, khususnya mata pelajaran Teknik Pengelasan Busur Manual dan memberikan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan pendidikan agar dapat dikembangkan kembali, baik pada jenjang ataupun jurusan lain.
- (2) Secara Praktis, yaitu memberikan gambaran mengenai perumusan pembiayaan satuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar kompetensi dan memberikan sudut pandang/alternatif pembiayaan satuan pendidikan dalam mengelola proses pendidikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan kerangka berfikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan partisipan penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang temuan penelitian dan pembahasan, berupa deskripsi hasil pengolahan data penelitian berdasarkan rumusan tujuan penelitian, pembahasan hasil penelitian yakni dengan mengkonfirmasi hasil pengolahan data dengan teori yang terkait.

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang merupakan intisari dari hasil temuan dan pembahasan

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan sumber yang digunakan penulis sebagai penunjang dalam penyusunan laporan.

LAMPIRAN

Berisikan lampiran.